

Potensi Kerjasama Antar Daerah Kabupaten Agam dengan Kota Bukittinggi dalam Penyediaan Air Baku

Andri¹, Wido Prananing Tyas²

Diterima : 3 April 2017

Disetujui : 29 Mei 2017

ABSTRACT

Agam Regency and Bukittinggi city are the two neighbouring regions and administratively adjoining territory. In order to improve drinking water services, Bukittinggi city has a lack of adequate raw water sources in its jurisdiction. Most of the raw water source used by Bukittinggi city today and the potential raw water sources are in the Agam Regency. Inter-regional cooperation is considered to overcome the problems of inequality between the raw water source between two regions. This study aims to explore and determine the potential of cooperation, stakeholder support and collaboration object capacity on inter-regional cooperation between Agam Regency and Bukittinggi city in providing the raw water supply. This research is using a Quantitative Methode, selection of sampling using a Snowbowling technique. The primary data were collected through questionnaires using Guttman Scale and Likert, the analyses were performed using scoring techniques and AHP. The analysis showed that the relationship between Agam and Bukittinggi in the raw water supply was dominated by a consulting relationship and the formal cooperation has not materialized. All stakeholders strongly supported the inter-regional cooperation between Agam and Bukittinggi in the raw water supply. The differing views were appeared in seeing the benefits and challenges of cooperation. Utilization of raw water becomes a priority in inter-regional cooperation, meanwhile the raw water service system and the legality of cooperation are the two priorities aspects in the inter-regional cooperation. The availability of raw water sources which are allocated as the object of cooperation is sufficient to meet the current drinking water needs and the 20 years projected needs to come of Bukittinggi and the population needs in sub-districts in Agam Regency adjacent to Bukittinggi.

Keywords : cross border region, inter-regional cooperation, stakeholder support, availability of raw water and drinking water needs.

ABSTRAK

Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi merupakan dua daerah bertetangga dan wilayahnya berbatasan administratif. Dalam peningkatan pelayanan air minum, Kota Bukittinggi menghadapi kendala keterbatasan sumber air baku di dalam wilayahnya. Sebagian besar sumber air baku yang digunakan di Kota Bukittinggi saat ini dan sumber-sumber air baku potensial terdapat di wilayah Kab. Agam. Kerjasama antar daerah dinilai dapat mengatasi permasalahan ketimpangan sumber air baku antara kedua daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menilai potensi kerjasama, dukungan stakeholder dan kapasitas objek kerjasama pada kerjasama antar daerah Kab. Agam dan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku. Penelitian menggunakan Metode Kuantitatif, dengan sampling menggunakan Teknik Snowbowling. Data primer dihimpun melalui kuisisioner Skala Guttman dan Likert, sedangkan analisis menggunakan teknik skoring dan AHP. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara Kota Bukittinggi dengan Kab. Agam dalam penyediaan air baku didominasi oleh hubungan konsultasi dan kerjasama formal belum terwujud. Semua stakeholder sangat mendukung kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku. Perbedaan terdapat dalam memandang sisi manfaat dan hambatan kerjasama. Pemanfaatan air baku menjadi kriteria prioritas, sedangkan sistem pelayanan air baku dan legalitas kerjasama menjadi dua aspek prioritas dalam kerjasama antar daerah. Ketersediaan air pada sumber air baku yang dialokasikan sebagai objek kerjasama sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan air minum saat ini dan proyeksi 20 tahun yang akan datang Kota Bukittinggi dan penduduk pada wilayah-wilayah kecamatan di Kabupaten Agam yang berdekatan dengan Kota Bukittinggi.

Kata kunci : wilayah perbatasan, kerjasama antar daerah, dukungan stakeholder, ketersediaan air baku dan kebutuhan air minum.

¹Bappeda Kabupaten Agam, Lubuk Basung
Kontak Penulis : andricomera@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam perencanaan dan pembangunan suatu wilayah atau kota, prasarana umum berfungsi mendukung unsur penduduk, kegiatan penduduk dan ruang. Penyediaan prasarana umum adalah faktor utama penggerak perekonomian. Pelayanan prasarana umum dapat mendukung kegiatan masyarakat berjalan optimal. Kondisi ini selanjutnya dapat memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Salah satu jenis prasarana umum yang sangat berguna bagi kegiatan penduduk adalah penyediaan air minum. Ketergantungan manusia terhadap air berbanding lurus dengan makin bertambahnya jumlah penduduk.

Seiring dengan kebijakan desentralisasi dan berlakunya otonomi daerah di Indonesia yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, terdapat pembagian wewenang dan peran struktural pemerintahan dalam penyediaan prasarana umum termasuk prasarana air minum. Hal ini berimplikasi bahwa daerah yang memiliki potensi air bersih yang besar, dengan kewenangan pemerintahnya dapat secara mandiri mengelola, mengatur dan memanfaatkannya. Namun kenyataannya, ditemukan banyak kebijakan daerah yang tidak saling mendukung atau kurang sinkron satu sama lain, termasuk kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan daerah.

Dalam permasalahan tersebut, tentu dibutuhkan koordinasi yang intensif dan terpadu. Pemanfaatan potensi sumber daya di kawasan perbatasan menurut Wahyono (2006), dapat dipadukan untuk saling melengkapi dan sinergi, sehingga dapat memperkuat daya dorong pembangunan. Koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan hendaknya melibatkan banyak instansi daerah, baik lintas horizontal daerah yang berbatasan, maupun lintas pemerintahan secara vertikal. Strategi yang dapat ditempuh adalah mengembangkan pola kerjasama antar daerah. Pratikno, et.al (dalam Laporan Akhir Model Kerjasama Antar Daerah, 2006) berpandangan bahwa daerah yang bertetangga secara geografis merupakan salah satu basis dalam pengembangan kerjasama antar daerah. Oleh karena itu, kabupaten/kota yang saling berbatasan langsung secara administratif memiliki potensi yang besar dalam penerapan kerjasama antar daerah.

Meningkatnya kebutuhan air minum juga dialami oleh Kota Bukittinggi di Propinsi Sumatera Barat. Cakupan pelayanan air minum Kota Bukittinggi Tahun 2015 oleh PDAM sebesar 43,45%, sedangkan tingkat pelayanan penyediaan air minum baik perpipaan maupun non perpipaan tercatat sebesar 58,45%. Dalam rangka pencapaian pemenuhan akses masyarakat terhadap air minum layak sesuai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2015–2030, Kota Bukittinggi menargetkan cakupan pelayanan air minum sebesar 80% pada Tahun 2019 dan menjadi 100% pada Tahun 2024. Untuk mendukung program tersebut, Kota Bukittinggi membutuhkan kapasitas air baku sekitar 400 ltr/dtk. Kebutuhan tersebut baru terpenuhi sekitar 180 ltr/dtk, sehingga masih dibutuhkan pasokan sebesar 220 ltr/dtk.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan air minum, terdapat kendala yaitu keterbatasan sumber air baku di dalam wilayah administrasi Kota Bukittinggi. Sekitar 70% debit pasokan sumber air minum yang digunakan Bukittinggi saat ini dan sumber-sumber lain yang potensial berlokasi di wilayah Kabupaten Agam. Wilayah Kabupaten Agam yang berbatasan dengan kota Bukittinggi memiliki potensi debit sumber air baku yang cukup besar, dan diperkirakan dapat menambah pasokan air minum untuk memenuhi kebutuhan air minum di Kota Bukittinggi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kerjasama antar daerah dinilai dapat mengatasi ketimpangan sumber air baku antara Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi. Melalui kerjasama antar daerah, diharapkan potensi air baku dapat dikelola secara baik dan tepat, sehingga dapat dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan air minum Kota Bukittinggi dan sumber pendapatan daerah bagi Kabupaten Agam. Kerjasama penyediaan air minum antara Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi sudah pernah diinisiasi, namun sampai saat ini kerjasama tersebut belum terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menilai potensi kerjasama, dukungan *stakeholder* dan kapasitas objek kerjasama pada kerjasama antar daerah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan positivistik rasionalistik. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik sampling yang dipilih dalam penelitian ini adalah *snowball sampling* atau teknik penentuan sampel bola salju yang merupakan *non-probability sampling*. Analisis pada penelitian ini menggunakan teknik *scoring* dan *Analytic Hierarchy Process (AHP)*. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik kuesioner, dengan jenis kuisisioner yang digunakan yaitu :

1. Skala Guttman. Data yang dihimpun dengan kuisisioner Skala Guttman ini adalah persepsi *stakeholder* tentang potensi kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku.
2. Skala Likert. Data yang dihimpun dengan kuisisioner Skala Likert ini adalah persepsi *stakeholder* tentang faktor-faktor pendukung, manfaat dan hambatan kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku.

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Ruang lingkup spasial penelitian adalah wilayah Kab. Agam dan Kota Bukittinggi.

Gambaran Wilayah Kabupaten Agam

Wilayah Kabupaten Agam memiliki batas-batas administratif sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan Kab. Pasaman dan Pasaman Barat
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Sebelah Selatan dengan Kab. Padang Pariaman dan Tanah Datar
4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.

Gambaran Wilayah Kota Bukittinggi

Wilayah Kota Bukittinggi secara geografis dikelilingi oleh 5 wilayah kecamatan di Kabupaten Agam. Batas-batas administratif Kota Bukittinggi sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Tilatang Kamang
2. Sebelah Timur dengan Kecamatan Ampek Angkek
3. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Banuhampu
4. Sebelah Barat dengan Kecamatan IV Koto dan Matur

Kota Bukittinggi memiliki luas wilayah 25,24 Km², memiliki jumlah penduduk 118.282 jiwa (Tahun 2014) dan kepadatan penduduk 4.686 jiwa/Km².

KAJIAN LITERATUR

Wilayah Perbatasan

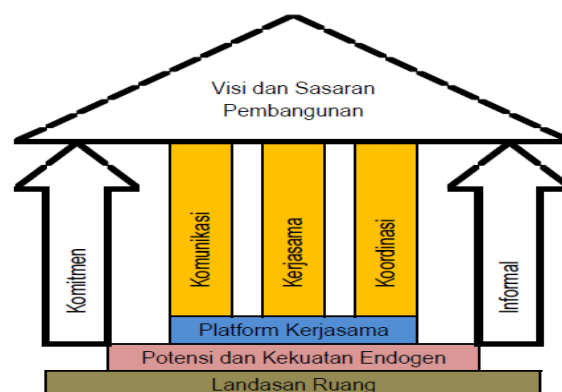
Kawasan perbatasan daerah memiliki peran dan fungsi yang penting dalam tatanan hubungan antar daerah. Mengingat peran dan fungsinya yang penting tersebut, maka kawasan perbatasan daerah perlu dikelola dengan baik dan tepat. Wahyono (2006) berpandangan bahwa sebagai tempat bertemunya pengaruh kewenangan, kebijakan dan pengaruh dari dua atau lebih pemerintah daerah, kawasan perbatasan memiliki potensi pembangunan yang besar. Jika kebijakan antar pemerintah daerah tersebut dapat dipadukan, sinergi pendorong pertumbuhan kawasan perbatasan akan lebih kuat dibandingkan dengan kawasan yang dikelola oleh hanya satu pemerintah daerah. Dalam rangka pengembangan kawasan yang berbatasan, Wahyudi dan Maria AP. Sari (2011) menilai bahwa kerjasama antar daerah merupakan suatu kebutuhan untuk menutup keterbatasan yang dimiliki dalam rangka pemerataan hasil pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.

Kebijakan Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut Syafrizal (2008), membuka kesempatan pemberian wewenang pengelolaan pembangunan yang lebih besar kepada daerah terutama kabupaten dan kota. Pemerintah memandang bahwa kerjasama antar daerah dengan didasari pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tertuang pada pasal 195 ayat 1 dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kerjasama Antar Daerah

Abdurrahman (2005) melihat bahwa pelaksanaan dan pengembangan kerjasama antar daerah kewilayahan atau regionalisasi desentralistik merupakan jawaban dalam menghadapi tantangan dinamika global serta desentralisasi. Bangunan regionalisasi desentralistik dideskripsikan Abdurrahman (2005) sebagaimana pada Gambar 1 di bawah ini.



Sumber : Abdurrahman (2005)

GAMBAR 1
BANGUNAN REGIONALISASI DESENTRALISTIK

Dalam kerjasama wilayah perbatasan, setelah melakukan serangkaian survei empiris, Zbicz (dalam Guo, 2005) menyimpulkan bahwa terdapat 6 tingkatan kerjasama lintas batas wilayah. Tingkatan kerjasama dan karakteristiknya masing-masing diuraikan sebagaimana pada Tabel 1 di bawah ini.

Berdasarkan pandangan beberapa tokoh antara lain Norton (dalam Setiawan, 2002), Wahyono (2004) dan Praktikno, et.al (dalam Laporan Akhir Model Kerjasama Antar Daerah, 2006), dapat dirangkum faktor–faktor pendukung kerjasama antar daerah sebagai berikut :

1. Basis ketetanggaan secara geografis
2. Basis kesetaraan permasalahan, dan atau adanya keunggulan (potensi) dan keterbatasan masing–masing daerah
3. Keterkaitan program perencanaan dan pembangunan
4. Ukuran dan kompetensi tiap pelaku kerjasama
5. Tekanan dari pemerintah (atasan)
6. Kebutuhan implementasi peraturan
7. Kemauan para pihak untuk bekerjasama
8. Ketersediaan kerangka legalitas kerjasama
9. Keterwakilan untuk berperan/bertanggung jawab pada organisasi kerjasama atau kontrak kerjasama

TABEL 1
TINGKATAN KERJASAMA WILAYAH PERBATASAN

No	Tingkat Kerjasama	Karakteristik Kerjasama	
0	Tidak Ada Kerjasama	0.1	Wilayah permusuhan dan konflik bersenjata
		0.2	Tidak ada komunikasi antara staf daerah yang berdampingan
1	Komunikasi	1.1	Berbagi informasi
		1.2	Komunikasi di antar staf
		1.3	Pertemuan tingkat rendah
		1.4	Memberitahukan tentang kegiatan yang mungkin memiliki dampak lintas batas
2	Konsultasi	2.1	Kedua belah pihak sepakat untuk berkonsultasi pada hal tertentu terkait kepentingan bersama
		2.2	Kewajiban untuk memberitahu tentang kegiatan yang mungkin memiliki dampak lintas batas
3	Kolaborasi	3.1	Pertemuan berkala
		3.2	Kerjasama program seperti penelitian bersama, pencarian dan penyelamatan, destinasi dan fasilitas wisata, dll
4	Koordinasi	4.1	Saling menghargai ekosistem sebagai satu kesatuan
		4.2	Tingkat perlindungan yang sama oleh kedua pihak
		4.3	Koordinasi perencanaan
		4.4	Komite penasehat bersama
5	Kerjasama Penuh	5.1	Manajemen yang Terkoordinasi
		5.2	Perlindungan bersama sumber daya alam dan lingkungan
		5.3	Perencanaan jangka panjang bersama

Sumber : Zbicz (dalam Guo, 2005)

Merujuk manfaat kerjasama antar daerah yang didefenisikan oleh Yudhoyono dan Pratikno, et.al (dalam Laporan Akhir Model Kerjasama Antar Daerah, 2006), serta Keban (2009), dapat diambil beberapa pokok pikiran tentang manfaat kerjasama antar daerah sebagai berikut :

1. Manajemen ego dan konflik antar daerah.
2. Standarisasi pelayanan.
3. Efisiensi anggaran
4. Mendorong pengembangan ekonomi.
5. Sinergisnya pengelolaan lingkungan
6. *Sharing* pengalaman, pengetahuan dan kekuatan
7. Membangun sikap transparansi, kebersamaan dan kepercayaan

Beberapa hambatan dalam kerjasama antar daerah yang dikemukakan beberapa tokoh seperti Setiawan (2002), Kuncoro (2004), Dwiyanto (2009), serta Wahyudi dan Maria AP (2011), dapat diambil sintesa sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran akan pentingnya melakukan kerjasama
2. Egoisme kedaerahan dan sektoral.
3. Perbedaan kepentingan, prioritas dan *political will*
4. Permasalahan legalitas kerjasama.
5. Lemahnya koordinasi antar sektor dan antar daerah.
6. Dominasi dan ketergantungan kepada pemerintah pusat
7. Tidak ada insentif kepada daerah untuk menjalin kerjasama dengan daerah lain
8. Belum banyak cerita keberhasilan kerjasama daerah dalam layanan publik (*best practice*)
9. Kecenderungan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Penyediaan Air Baku sebagai Objek Kerjasama Antar Daerah

Penyediaan air bersih menurut Dartanto (2009) merupakan salah satu bidang yang potensial dikembangkan dalam skema kerjasama antar daerah di Indonesia. Kriteria dan aspek-aspek penyediaan air baku pada kerjasama antar daerah yang dirangkum dari pandangan Soenarno (2002) dan Roosmany (2003), serta arahan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yaitu :

1. Kriteria dalam Penyediaan Air Baku pada Kerjasama Antar Daerah yaitu : (1) Pemanfaatan, (2) Pelestarian dan (3) Operasional Pelayanan
2. Aspek-aspek Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Air Baku, meliputi : (1) Kuantitas Air Baku, (2) Kualitas Air Baku, (3) Konservasi Sumber Air Baku, (4) Kelembagaan Kerjasama, (5) Sistem Pelayanan Air Baku, (6) Legalitas Kerjasama (7) Kompensasi dan (8) Peran Serta Masyarakat.

ANALISIS

Hubungan Kab. Agam dengan Kota Bukittinggi dalam Penyediaan Air Baku

Analisis ini bertujuan untuk menilai dan mengukur tingkat hubungan kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku. Data yang dianalisis adalah persepsi *stakeholder* yang dihimpun melalui kuisisioner dengan Skala Guttman. Analisis dilakukan dengan teknik skoring. Tingkat hubungan antar daerah Kab. Agam dengan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku digambarkan sebagaimana Tabel 2 di bawah ini.

TABEL 2
PERBANDINGAN HASIL ANALISIS DENGAN TEORI TINGKATAN KERJASAMA

HASIL ANALISIS			TEORI TINGKATAN KERJASAMA	
No	Uraian	Bobot	Tingkatan	Uraian
1	Konsultasi	87,50 %	I	Tidak ada kerjasama
2	Komunikasi	62,50 %	II	Komunikasi
3	Kolaborasi	56,25 %	III	Konsultasi
4	Koordinasi	53,13 %	IV	Kolaborasi
5	Kerjasama Penuh	46,88 %	V	Koordinasi
6	Tidak ada kerjasama	31,25 %	VI	Kerjasama Penuh

Sumber : Hasil Analisis, 2016

Berdasarkan urutan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Urutan tertinggi adalah Konsultasi. Artinya bahwa tingkat kerjasama antar daerah berada pada Level Konsultasi.
2. Komunikasi, Kolaborasi dan Koordinasi bernilai lebih dari 50%. Artinya bahwa antara kedua daerah telah terjalin komunikasi, kolaborasi dan koordinasi.
3. Kerjasama Penuh bernilai kurang dari 50%. Artinya antara kedua daerah belum terjalin kerjasama penuh dan upaya mewujudkan kerjasama penuh masih rendah.
4. Level terbawah adalah : Tidak ada kerjasama. Hal ini membuktikan hubungan antara kedua daerah bukanlah putus atau tertutup sama sekali.

Dukungan Stakeholder Terhadap Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Air Baku

Analisis ini bertujuan untuk mengkaji dan menilai dukungan *stakeholder* terhadap kerjasama antar daerah Kab. Agam dengan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku. Analisis dilakukan terhadap persepsi *stakeholder* tentang faktor pendukung, manfaat dan hambatan kerjasama antara daerah dalam penyediaan air baku. Persepsi dan deskripsi dukungan *stakeholder* terhadap kerjasama antar daerah Kab. Agam dengan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku digambarkan pada Tabel 3 di bawah ini.

TABEL 3
REKAPITULASI PERSEPSI DAN DESKRIPSI DUKUNGAN STAKEHOLDER

No	Kajian	Kekuatan Persepsi			Deskripsi Dukungan Stakeholder
		Pemprov Sumbar	Pemkot Bukittinggi	Pemkab Agam	
1	Faktor Pendukung	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Ketiga kelompok <i>stakeholder</i> memiliki sikap yang sama yaitu sangat setuju dengan faktor pendukung kerjasama antar daerah
2	Manfaat	Sangat Kuat	Sangat Kuat	Kuat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dua kelompok <i>stakeholder</i> (Sumbar dan Bukittinggi) memiliki sikap yang sama yaitu sangat mendukung manfaat dari kerjasama antar daerah, ▪ Sedangkan sikap Kab. Agam setuju dan mendukung manfaat kerjasama antar daerah
3	Hambatan	Cukup/ Sedang	Kuat	Kuat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dua kelompok <i>stakeholder</i> (Bukittinggi dan Agam) memiliki sikap yang sama yaitu menyadari bahwa terdapat hambatan dalam mewujudkan kerjasama antar daerah ▪ Sedangkan Pemprov Sumbar memandang bahwa hambatan kerjasama dalam sikap yang wajar

Sumber : Hasil Analisis, 2016

Aspek-aspek Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Air Baku

Analisis ini bertujuan untuk menentukan aspek-aspek prioritas kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku. Analisis dilakukan menggunakan AHP (*Analytic Hierarchy Process*) terhadap data yang dihimpun melalui pengisian kuisioner oleh responden, yang merupakan *expert* atau informan ahli. Dalam pengolahan data, proses dibantu dengan menggunakan aplikasi *Expert Choice 11*.

Hasil analisis urutan kriteria prioritas kerjasama antar daerah Kab. Agam dengan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku sebagai berikut : (1) Pemanfaatan, (2) Operasional

Pelayanan dan (3) Pelestarian. Sedangkan aspek-aspek prioritas kerjasama antar daerah Kab. Agam dengan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku diurutkan sebagai berikut : (1) Sistem Pelayanan, (2) Legalitas, (3) Peran Masyarakat, (4) Kuantitas Air Baku, (5) Kelembagaan, (6) Kompensasi, (7) Konservasi dan (8) Kualitas Air Baku.

Analisis Ketersediaan Air Baku

Langkah-langkah analisis sebagai berikut :

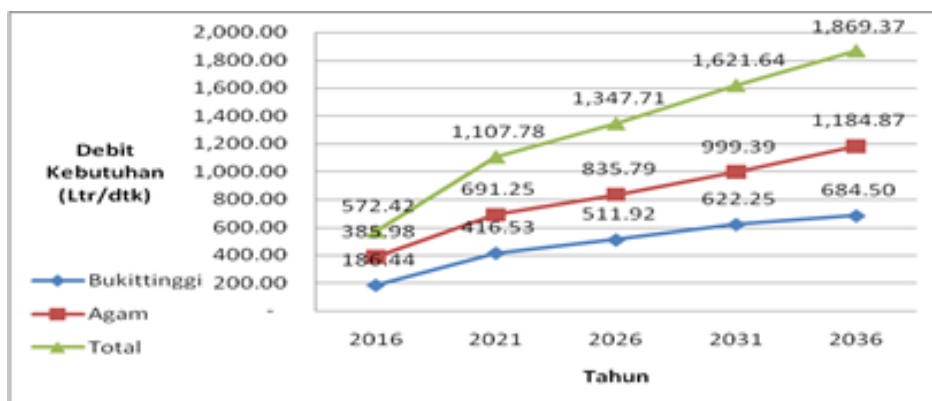
- a. Inventarisasi sumber-sumber air baku. Inventarisasi dimaksudkan untuk mendeskripsikan sumber air yang memungkinkan dikembangkan sebagai sumber air baku dalam lingkup kerjasama antar daerah. Hasil inventarisasi terdapat 171 titik lokasi sumber air baku yang tersebar pada 10 wilayah kecamatan di Kab. Agam.
- b. Penilaian potensi sumber air baku
Selanjutnya, berpedoman kepada Permen PU No. 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), maka dilakukan pembobotan terhadap sumber-sumber air baku yang telah diinventarisasi berdasarkan kriteria : (1) Jarak sumber air ke wilayah pelayanan, (2) Beda elevasi sumber air dengan wilayah pelayanan, (3) Debit sumber air, (4) Kualitas air dan (5) Pemakaian sumber air saat ini (eksisting). Hasil rekapitulasi dikelompokkan berdasarkan kecamatan dan disusun menurut nilai bobot.

Analisis Kebutuhan Air Minum

Penentuan kebutuhan air sebagaimana diatur dalam Permen PU No. 18/PRT/M/2007 tentang SPAM, didasarkan pada :

1. Proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk harus dilakukan untuk interval 5 tahun selama periode perencanaan
2. Pemakaian air (L/o/h). Laju pemakaian air diproyeksikan setiap interval 5 tahun.
3. Ketersediaan Air

Proyeksi kebutuhan air minum penduduk Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi Tahun 2016–2036 ditampilkan pada Gambar 2 di bawah ini.



Sumber : Hasil Analisis, 2017

GAMBAR 2
GRAFIK PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM
KAB. AGAM DAN KOTA BUKITTINGGI 2016–2036

Analisis Pemenuhan Kebutuhan Air Minum

Dalam pemenuhan kebutuhan air minum, Roosmany (2003) mengingatkan bahwa pemanfaatan sumber air untuk pelayanan daerah harus tetap memberikan kesempatan bagi masyarakat di lingkungan sumber air tersebut untuk mendapatkan layanan air bersih. Melalui kerjasama antar daerah Kab. Agam dengan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku hendaknya dapat dimanfaatkan oleh kedua daerah untuk membangun kegiatan bersama, sehingga dapat mendukung penerapan efisiensi dan standarisasi pelayanan penyediaan air baku.

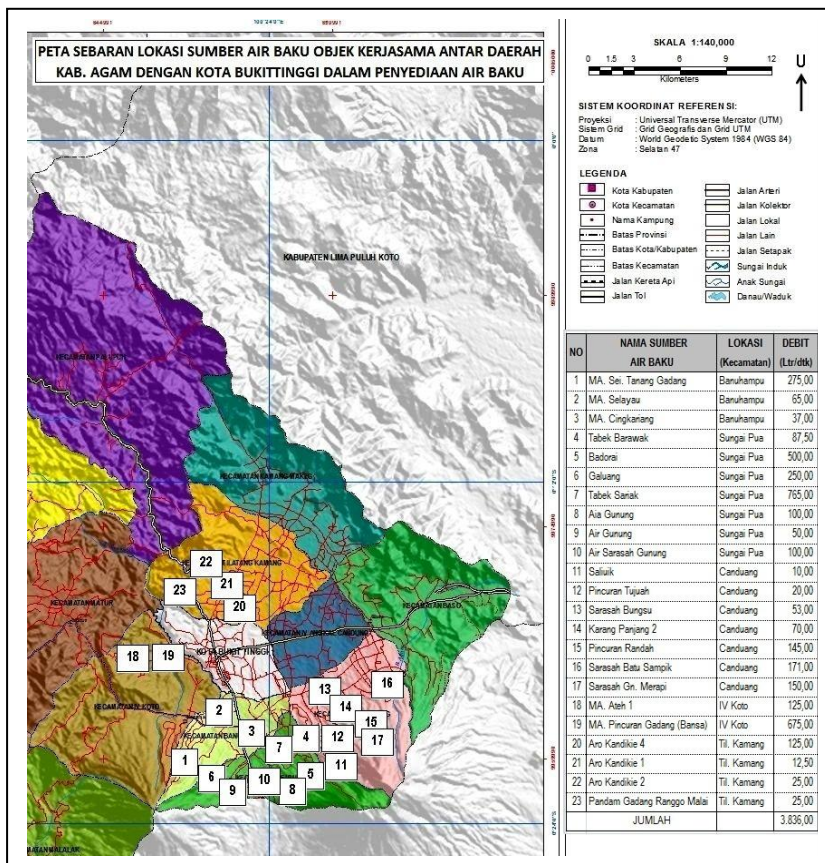
Untuk itu, dalam konteks kerjasama antar daerah Kab. Agam dengan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku, perlu diimplementasikan pemerataan dan standarisasi pelayanan. Pemerataan dan standarisasi pelayanan mencakup wilayah Kota Bukittinggi dan 10 wilayah kecamatan di Kab. Agam yang berdekatan dengan kota Bukittinggi, yaitu : Banuhampu, Baso, Canduang, IV Angkek, IV Koto, Kamang Magek, Palupuh, Sungai Pua, Tilatang Kamang dan Malalak

Analisis Sumber–sumber Air Baku Objek Kerjasama

Analisis sumber–sumber air baku yang akan dialokasikan sebagai objek kerjasama antar daerah Kab. Agam dengan Kota Bukittinggi dilakukan dengan memilih dari sumber–sumber air baku potensial, Sumber–sumber air baku potensial diperoleh berdasarkan hasil penilaian/pembobotan, yang tersebar pada 10 wilayah kecamatan di Kab. Agam yang berdekatan dengan Kota Bukittinggi. Pertimbangan dalam pemilihan sumber air baku objek kerjasama sebagai berikut :

1. Sumber air baku yang dipilih merupakan sumber yang paling potensial.
2. Debit sumber air baku mampu memenuhi kebutuhan air minum Kota Bukittinggi saat perencanaan dan proyeksi kebutuhan 20 tahun y.a.d.
3. Dalam rangka pemerataan pelayanan bagi masyarakat, debit sumber air baku yang dialokasikan juga mampu memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Kab. Agam di wilayah yang berdekatan dengan Kota Bukittinggi.
4. Menyikapi pemanfaatan eksisting sumber air baku untuk konsumsi dan kegiatan masyarakat di sekitar lokasi, maka debit sumber yang akan dimanfaatkan diasumsikan sebesar 50% dari kapasitas sumber yang ada.
5. Untuk efektifitas proses pengambilan air baku , maka sebaran lokasi sumber air baku berada dalam lingkup wilayah yang sama atau jarak antar lokasi sumber tidak terlalu jauh.

Hasil pemilihan sumber–sumber air baku untuk objek kerjasama antar daerah Kota Bukittinggi dan Kab. Agam, sebagaimana dalam peta pada Gambar 3 di bawah ini.



Sumber : <https://petatematikindo.files.wordpress.com>, dan Hasil Analisis, 2017

GAMBAR 3
PETA SEBARAN LOKASI SUMBER AIR BAKU OBJEK KERJASAMA ANTAR DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KOTA BUKITTINGGI

Analisis Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Kota Bukittinggi dan Kab. Agam

Analisis dilakukan dengan membandingkan antara total debit kebutuhan air minum Kota Bukittinggi dan kebutuhan masyarakat Kab. Agam yang berdekatan dengan Kota Bukittinggi, dengan debit ketersediaan air sumber-sumber air baku objek kerjasama. Alokasi debit sumber air baku objek kerjasama diharapkan juga mampu memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Kab. Agam pada 10 wilayah kecamatan Kab. Agam yang berdekatan dengan Kota Bukittinggi.

Dari perbandingan tersebut terlihat bahwa debit ketersediaan air pada sumber-sumber air baku objek kerjasama memadai untuk memenuhi total kebutuhan air minum kedua daerah, sebagaimana digambarkan pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4
Perbandingan Debit Kebutuhan Air Minum Kota Bukittinggi dan Kab. Agam dengan Ketersediaan Air Baku Tahun 2016–2036 (dalam Ltr/dt)

URAIAN	KEBUTUHAN AIR MINUM					KETERSEDIAAN AIR BAKU	
	TAHUN					TOTAL	OBJEK KERJASAMA
	2016	2021	2026	2031	2036		
BUKITTINGGI	186,44	416,53	511,92	622,25	684,50		
AGAM	385,98	691,25	835,79	999,38	1.184,87	52.735,84	3.836,00
1 Banuhampu	56,49	103,61	128,00	156,04	188,19	546,78	377,00
2 Baso	51,11	98,67	128,31	164,66	209,05	45.447,00	-
3 Candung	31,66	54,10	62,28	70,74	79,49	1.053,60	619,00
4 IV Angkek	68,43	127,36	159,68	197,55	241,79	80,00	-
5 IV Koto	32,81	55,40	63,01	70,72	78,52	1.309,00	800,00
6 Kamang Magek	28,27	47,43	53,59	59,76	65,92	81,14	-
7 Palupuh	18,79	31,98	36,66	41,48	46,42	162,00	-
8 Sungai Pua	34,41	60,82	72,41	85,07	98,88	1.990,50	1.852,50
9 Tilatang Kamang	51,14	90,33	107,49	126,22	146,63	256,42	187,50
10 Malalak	12,85	21,56	24,36	27,17	29,97	1.809,40	-
BUKITTINGGI & AGAM	572,42	1.107,78	1.347,71	1.621,64	1.869,37	52.735,84	3.836,00

Sumber : Hasil Analisis, 2017

KESIMPULAN

Dalam lingkup hubungan antar Kabupaten Agam dengan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku terdapat potensi kerjasama antar daerah. Potensi yang mengemuka adalah hubungan konsultasi, artinya interaksi antara kedua daerah didominasi oleh upaya-upaya konsultasi dalam penyediaan air baku. Merujuk kepada teori tingkatan kerjasama antar daerah, level Konsultasi berada pada tingkatan yang ke-3, dari 6 tingkatan yang ada. Untuk mewujudkan Kerjasama Penuh yang berada pada level tertinggi, maka terdapat 3 level lagi yang harus dicapai yaitu : Kolaborasi, Koordinasi dan akhirnya Kerjasama Penuh.

Dukungan kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku dirumuskan sebagai berikut :

1. Dukungan *Stakeholder*. *Stakeholder* sangat mendukung kerjasama antar daerah Kab. Agam dengan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku. Dukungan ini didasari oleh sikap *stakeholder* yang sangat setuju terhadap faktor-faktor pendukung kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku. Namun terdapat sedikit perbedaan (*gap*) pandangan antar *stakeholder* dalam melihat sisi manfaat dan hambatan kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku, yaitu :
 - a. *Stakeholder* Pemprov Sumbar dan Kota Bukittinggi memiliki sikap yang sama yaitu sangat mendukung manfaat dari kerjasama antar daerah, sedangkan dukungan *stakeholder* Kab. Agam tidak sebesar dukungan Sumbar dan Bukittinggi.
 - b. *Stakeholder* Kota Bukittinggi dan Kab. Agam memiliki sikap yang sama yaitu menyadari bahwa terdapat hambatan dalam mewujudkan kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku, sedangkan Pemprov Sumbar memandang bahwa hambatan dalam kerjasama antar daerah merupakan sesuatu yang wajar.
2. Air baku yang akan dijadikan sebagai objek kerjasama antar daerah, potensi ketersediaan sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan air minum Kota Bukittinggi saat ini dan proyeksi kebutuhan sampai 20 tahun y.a.d. Ketersediaan tersebut juga mencukupi untuk

memenuhi kebutuhan air minum pada 10 wilayah kecamatan di Kab. Agam yang berdekatan dengan Kota Bukittinggi.

Dukungan kerjasama antar daerah juga tampak dalam kebijakan tata ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012–2032, yang mengarahkan bahwa sistem pengelolaan air minum (SPAM) dapat dikembangkan melalui upaya bersama lintas pemerintah kabupaten/kota.

Kriteria prioritas pada kerjasama antar daerah Kota Bukittinggi dengan Kab. Agam dalam penyediaan air baku yaitu : (1) Pemanfaatan, (2) Operasional pelayanan dan (3) Pelestarian. Sedangkan aspek-aspek prioritas pada kerjasama antar daerah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam dalam penyediaan air baku meliputi : (1) Sistem Pelayanan Air Baku, (2) Legalitas Kerjasama, (3) Peran Serta Masyarakat, (4) Kuantitas Air baku, (5) Kelembagaan Kerjasama, (6) Kompensasi Kerjasama, (7) Konservasi Sumber air Baku dan (8) Kualitas Air baku.

Kerjasama antar daerah Kab. Agam dengan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku diyakini akan memberikan banyak manfaat kepada kedua daerah yaitu :

- 1) Pemerataan, efisiensi dan standarisasi pelayanan
- 2) Saling berbagi keuntungan (*Sharing of Benefit*)
- 3) Bersama menanggung biaya (*Sharing of Burden*)
- 4) Kedua pihak yang bekerjasama akan lebih berdaya
- 5) Menghilangkan ego daerah dan mencegah konflik penyediaan air baku.
- 6) Masing-masing pihak lebih merasakan keadilan.
- 7) Terjaminnya keberlanjutan pengelolaan penyediaan air baku

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan kerjasama antar daerah Kab. Agam dengan Kota Bukittinggi dalam penyediaan air baku, sebagai berikut :

- 1) Perbedaan kepentingan dan prioritas antar daerah dalam penyediaan air baku
- 2) Egoisme kedaerahan dan kecenderungan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
- 3) Ketidaksiapan dan keenganan pemerintah daerah untuk terikat kerjasama antar daerah
- 4) Ketergantungan kepada pemerintah pusat dalam inisiasi kerjasama
- 5) Belum banyak cerita keberhasilan kerjasama daerah sebagai *Best Practice*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Benjamin. 2005. “Pemahaman Dasar Regional Management dan Regional Marketing : Instrumen Strategis Pembangunan Wilayah dan Kota dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi dan Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah”. Semarang : IAP Jateng.
- Dartanto, Teguh. 2009. “Kerjasama Antar Daerah dan Peningkatan Layanan Masyarakat”. Dalam Brodjonegoro, Bambang PS, et.al. 2009. Sewindu Otonomi Daerah Perspektif Ekonomi. Jakarta : KPPOD, hal. 164–173. Available at: <http://xayimg.com>. Diakses pada 22 Februari 2015.
- Dwiyanto, Agus. 2010. “Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Intensif dan Kolaboratif”. Edisi Kedua. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Guo, Rongxing. 2005. “Cross-Border Resource Management Theory and Practice”. Amsterdam : Elsevier B.V.

- Keban, Yeremias T. 2009. “Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi: Isu, Strategis, Bentuk dan Prinsip”. Available at: <http://www.bappenas.go.id>. Diakses pada 18 Februari 2015.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. “Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang”. Jakarta : Erlangga.
- Roosmany. 2003. “Kajian Pengelolaan Sumber Air Baku antara Kabupaten Semarang dan Kota Semarang”. Tesis tidak diterbitkan. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Setiawan, Putu Rudy. 2002. “Pengelolaan Infrastruktur Kota Mekanisme Kerjasama Antar Daerah”. Dalam Winarso, Haryo et.al. (ed) Pemikiran dan Praktek Perencanaan dalam Era Transformasi di Indonesia. Bandung : Departemen Teknik Planologi ITB dan Yayasan Sugijanto Soegijoko, hal 123–135.
- Syafrizal. 2008. “Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi”. Padang : Baduose Media.
- Wahyono, Hadi. 2006. “Pengelolaan Prasarana Umum di Kawasan Perbatasan Kota”. Jurnal Tataloka Volume 8 Nomor 1 Januari 2006. Semarang : Biro Penerbit Planologi Undip.
- Wahyudi, Andi dan Maria AP. Sari. 2011. “Kerjasama Antar Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah dan Pelayanan Publik di Kawasan Perbatasan”. Available at: <http://download.portalgaruda.org>. Diakses pada 26 Februari 2015.
- _____, Laporan Akhir Model Kerjasama Antar Daerah. Kerjasama Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Politik UGM Yogyakarta dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), 2006. Available at: <http://upload.ugm.ac.id>. Diakses pada 19 Februari 2015.
- _____, Peraturan Menteri PU No. 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM).
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- _____, Undang–Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. <https://petatematikindo.files.wordpress.com>. Diakses 23 April 2015

